

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Lokasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin terletak di Jalan A.Yani Km.22, Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang. Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas tanah 12.993 m<sup>2</sup> (Sertifikat No. 2690/2000) diresmikan pada tanggal 3 Pebruari 1984 oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama saat itu, H. Aswasmarmo.

##### **2. Sejarah singkat berdirinya Balai Diklat Banjarmasin**

Berdirinya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Semenjak dibentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946 telah diterbitkan berbagai Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama dalam rangka penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Sejarah berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesiapada tanggal 01 Agustus 1950. Pada tahun 1968, terbentuklah

perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada. Kemudian, dengan diterbitkannya Kepres Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975, maka perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan itu diubah menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk tingkat Kabupaten atau Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.

Terkait diklat pegawai Kementerian Agama, pada awalnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) pegawai menjadi tugas Biro Kepegawaian namun kemudian dialihkan ke Biro Penelitian dan Analisa setelah diterbitkannya KMA Nomor 47 Tahun 1963 tentang Perincian Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pada tahun 1969, tugas ini kembali kepada Biro Kepegawaian dengan diterbitkannya KMA Nomor 114 Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi, Tugas-Kewajiban, Wewenang dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya, bidang kediklatan dilimpahkan kepada Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai setelah diberlakukannya KMA Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Pusdiklat Pegawai ini berada di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Agama.

Di dalam KMA Nomor 18 Tahun 1975 juga dijelaskan bahwa apabila dipandang perlu maka Menteri Agama dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Agama sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk pembentukan Balai Pendidikan dan Latihan di daerah-daerah dengan terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Seiring dengan semakin banyaknya pengangkatan guru agama di Kalimantan Selatan, maka pembinaan pun perlu dilakukan. Karena itu, dibentuklah Balai Pendidikan Guru Agama (BPGA) sebagai bagian dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Banjarmasin. Pada tahun 1979, jabatan kepala BPGA dipercayakan kepada Drs. H. Achmad Rabbani.

Secara nasional, volume dan beban kerja di bidang pendidikan dan latihan pegawai semakin meningkat, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Dengan menimbang hal tersebut dan juga atas dasar prinsip sentralisasi perencanaan dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Departemen Agama, maka Menteri Agama membuat usulan pembentukan Balai Diklat Pendidikan dan Latihan di lingkungan Departemen Agama. Usulan tersebut mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B-5041/1MENPAN/3/1981. Menteri Agama menindaklanjuti persetujuan itu dengan menerbitkan KMA Nomor 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/ Kotamadya dan Balai Diklat Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama pada tanggal 23 Mei 1981. Sesuai KMA Nomor 45 Tahun 1981 tersebut berdirilah 12 (dua belas) Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama, yang salah satunya berada di Kalimantan Selatan. Posisi sebagai kepala Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Banjarmasin tetap dipercayakan kepada Drs. H. Achmad Rabbani.

Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Banjarmasin dibangun pada lahan dengan luas tanah 12.993 m<sup>2</sup> (Sertifikat No. 2690/2000) yang berlokasi di Jl. A. Yani KM 22 No. 22 Landasan Ulin Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan diresmikan pada tanggal 3 Pebruari 1984 oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama saat itu, H. Aswasmarmo. Pada awalnya, kuantitas kegiatan pelatihan masih sangat sedikit. Karena pada saat itu akses transportasi masih sangat terbatas dan jarak Banjarmasin Banjarbaru cukup jauh maka untuk memudahkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Achmad Rabbani mengambil kebijakan untuk menyewa kantor di PIII Kalimantan Selatan yang beralamat di II. Kertak Baru Ilir Banjarmasin (sekarang menjadi Jl, Mf Haryono). Selain itu, para pegawai Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Banjarmasin mayoritas berdomisili di Banjarmasin terbantu dengan adanya kebijakan ini. Dengan demikian, kegiatan operasional Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Banjarmasin pun dilaksanakan di dua tempat, yakni di Banjarbaru dan di Banjarmasin. Keadaan ini berlangsung dari tahun 1989- 1991.

Seiring perkembangannya, terjadi penataan organisasi Balai Diklat Keagamaan mengikuti perubahan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya KMA Nomor 345 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan, nomenklatur Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan berubah menjadi Balai Diklat Keagamaan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Dengan demikian Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Banjarmasin menjadi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dengan wilayah kerja meliputi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (sejak tahun 2013 bertambah dengan Kalimantan Utara) dengan 41 Kabupaten / Kota.

Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin sejak terbentuknya sampai sekarang adalah sebagai berikut.

**Tabel I. Data Kepala Balai**

No.	Nama Kepala Balai	Masa Jabatan
1	Drs. H. Achmad Rabbani	1979 - 1993
2	Drs. H. Marzuki	1993 - 1997
3	Drs. H. Anwar Aziz	1997 - 2002
4	Drs. H. Napiyah Muhja	2002 - 2005
5	Drs. H. Noor Tajuddin	2005 - 2009
6	Drs. H. Baseri, M.Pd.	Pgs. Kepala, 2009 - 2010
7	DR. H. A. Rahmani, M.Ag	2010 - 2016
8	Drs. H. Humaidi, S.Sos., MAP	2016 - 2018
9	H. Zainal Ilmi, S.Ag., M.Pd.I	2018 - 2019
10	Drs. Muhran	2020 - Sekarang

*Sumber: Bagian Ketatausahaan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin*

**Tabel II. Identitas Balai Diklat Banjarmasin**

<b>1.</b>	<b>Nama Lembaga Diklat</b>	<b>:</b>	<b>Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin</b>
<b>2.</b>	<b>N S M</b>	<b>:</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Status</b>	<b>:</b>	<b>Negeri</b>
<b>4.</b>	<b>Alamat</b>		
	<b>Jalan</b>	<b>:</b>	Jalan A. Yani Km.22, Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang. Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan
	<b>Kode Pos</b>	<b>:</b>	<b>70723</b>

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>:</b>	<b>Landasan Ulin Tengah</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>:</b>	<b>Liang Anggang</b>
<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>:</b>	<b>Banjarbaru</b>
<b>Nama Kepala Balai</b>	<b>:</b>	<b>Drs. Muhran</b>
<b>No. Telpon</b>	<b>:</b>	<b>(0511) 4705071</b>
<b>Email</b>	<b>:</b>	<b><a href="mailto:bdkbanjarmasin@kemenag.go.id">bdkbanjarmasin@kemenag.go.id</a></b>
<b>Website</b>	<b>:</b>	<b><a href="http://www.bdkbanjarmasin.kemenag.go.id">www.bdkbanjarmasin.kemenag.go.id</a></b>

*Sumber: Bagian Ketatausahaan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.*

### **3. Visi dan Misi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

#### **Visi :**

Mewujudkan PNS Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur yang kompeten dan profesional.

#### **Misi :**

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan diklat keagamaan melalui penyediaan tenaga yang berkompeten dan profesional di bidang administrasi dan teknis keagamaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan diklat keagamaan dengan peningkatan prasarana dan sarana penunjang diklat secara optimal.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kemitraan kediklatan baik internal maupun eksternal Depag agar pelaksanaan diklat lebih berkualitas.

#### **4. Tugas dan Fungsi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Berdasarkan KMA Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin mempunyai Tugas dan Fungsi, sebagai berikut:

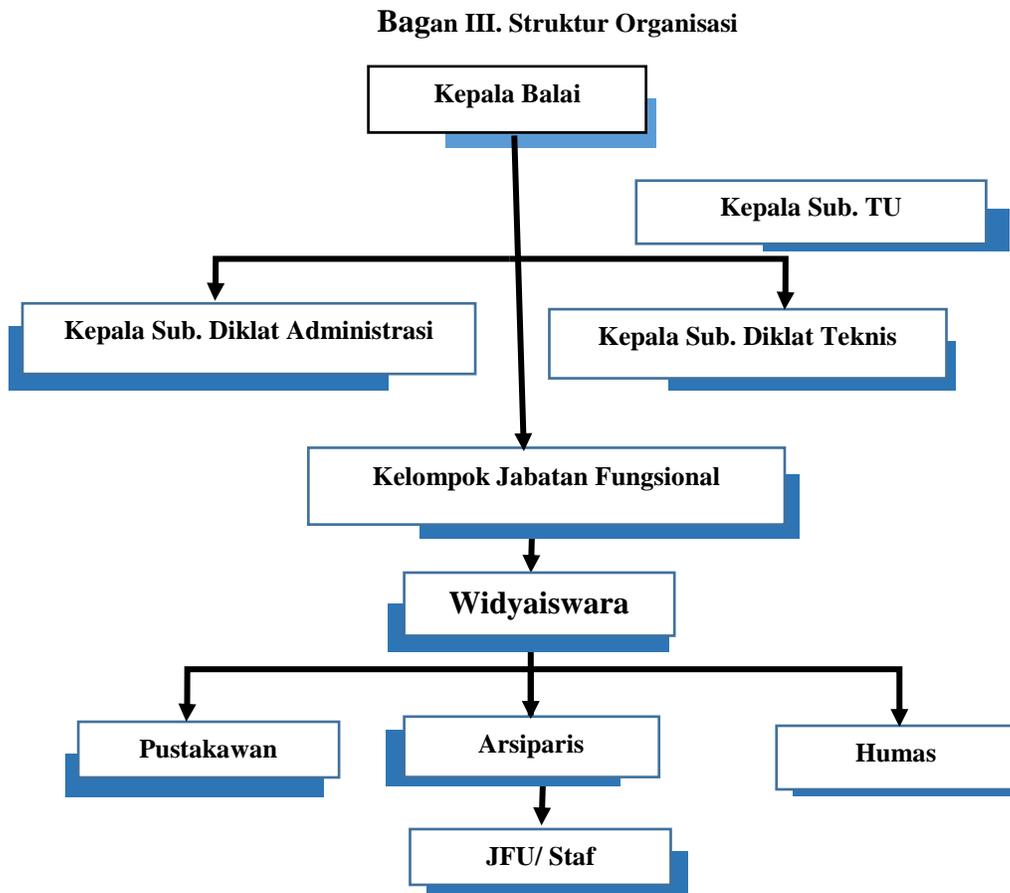
a. Tugas Pokok : Menyelenggarakan Diklat Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Keagamaan sesuai wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

b. Fungsi :

Balai Diklat keagamaan Banjarmasin menjalankan fungsi :

- 1) Perumusan Visi, Misi dan kebijakan Balai Diklat Keagamaan
- 2) Penyelenggaraan diklat Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Keagamaan
- 3) Pelayanan di bidang diklat keagamaan
- 4) Penyiapan dan penyajian laporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen Agama dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya.

## 5. Struktur Organisasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin



*Sumber: website resmi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.<sup>1</sup>*

Untuk melengkapi struktur organisasi yang ditampilkan, berikut disertai tugas dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut.

---

<sup>1</sup> <https://www.bdkbanjarmasin.kemenag.go.id>, di akses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.00 WITA.

a. Kepala Balai

Kepala Balai Diklat Keagamaan memiliki beberapa tugas, yakni sebagai berikut.

- 1) Wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan instansi kementerian agaman dan instansi lain di luar kementerian agama.
- 2) Menyusun pengembangan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis kementerian agama.
- 3) Wajib menyelenggarakan dan membuat pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wajib melaksanakan pengawasan, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik Negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelapor pada Balai Diklat Keagamaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Pasal 10-13.

<sup>3</sup> Balai Diklat Kementerian Agama Surabaya, *Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan Keagamaan*, (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan Surabata, 2015), h.1.

c. Kasi Administrasi

Kepala seksi diklat tenaga administrasi mempunyai tugas menyiapkan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat tenaga administrasi. Sedangkan, seksi diklat administrasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

d. Kasi TTPK

Seksi Tenaga Teknis diklat mempunyai tugas melakukan menyiapkan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.<sup>4</sup>

e. Widyaiswara

Widyaiswara memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam mengajar, mendidik, melatih PNS dan Calon PNS sesuai dengan jabatannya.<sup>5</sup>

f. Pustakawan

Pustakawan memiliki tugas dua tugas pokok, yakni: pertama, pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kedua, pustakawan tingkat ahli bertugas dalam pengorganisasian dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>5</sup> Kusyamto, Nyoma Daste, Mahraeni, Studi Evaluasi Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional Tenaga Kependidikan Bagi Guru Agama SMP pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar, *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dasar*, Vol. 3, 2013, h.8.

pendayagunaan koleksi bahan atau sumber informasi masyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi.<sup>6</sup>

g. Arsiparis

Memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.<sup>7</sup>

h. Humas

Hubungan Masyarakat atau humas memiliki beberapa tugas yaitu salah satunya ialah; Pertama, bertugas mengadakan penyelidikan tentang kebutuhan, kepentingan, dan keinginan masyarakat. Kedua, mengadakan pameran. Ketiga, bertugas menerima dan mengundang tamu, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, h.4.

<sup>7</sup> Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, h.4.

<sup>8</sup> Wahyuddin Hamka, *Strategi Humas Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dalam penyebarluasan informasi melalui media online*, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2016), h.43.

## i. JFU/ Staf

Jabatan Fungsional tertentu memiliki tugas sesuai dengan kelompok atau posisi jabatannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## 6. Keadaan Pegawai Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

Tabel IV. Keadaan Pegawai 2020/2021

No.	Pegawai	Gol	Gol	Gol	Jumlah
		II	III	IV	
1.	Pejabat		3	1	4
2.	Widyaiswara		12	7	19
3.	JFT (Arsiparis, Humas, dan Pustakawan)		4	2	6

*Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.*

## 7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel V. Sarana dan Prasarana

No	Nama	Kondisi	Jumlah			Milik
		Baik	Rusak	Rusak	Baik	
1	Ruang belajar	2			2	Balai
2	Asrama	5			5	Balai
3	Ruang Kepala Seksi	2			2	Balai
4	Ruang Blue Safir	2			2	Balai
5	Ruang Nilam	2			2	Balai

6	Ruang Laboratorium	2			2	Balai
7	Mushalla	1			1	Balai
8	Koperasi	1			1	Balai
9	Ruang Humas	1			1	Balai
10	Gudang	1			1	Balai
11	Perpustakaan	1			1	Balai
12	Ruang Lainnya	27			27	Balai

## B. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lokasi selama proses penelitian berlangsung, baik melalui observasi, wawancara, hingga dokumentasi. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.

Pada penyajian data ini, penulis kelompokkan sesuai dengan urutan perumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, agar memudahkan dalam penyajian dan analisis data. Pada penyajian data tentang Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Madrasah (studi kasus di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin), maka data yang disajikan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Program Diklat

Perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah manajemen diklat yang didalamnya merupakan proses penentuan secara matang terhadap

sesuatu yang akan dikerjakan dimasa mendatang dalam rangka mencapai tujuan program diklat tenaga kependidikan madrasah yang akan diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Terdapat beberapa proses dalam sebuah perencanaan diklat yaitu sebagai berikut:

1) Analisis kebutuhan diklat

Salah satu bentuk analisis kebutuhan diklat disini ialah proses rencana kerja diklat yang dilakukan setiap satu tahun sekali, dan diselenggarakan pada akhir tahun, dan dilakukan tiap satu tahun sebelum program diklat diselenggarakan. Hal ini serupa dengan pendapat Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis, yang menerangkan bahwa: “Dalam proses penyusunan rencana kerja program diklat, balai diklat menjalankannya setiap akhir tahun, untuk mempersiapkan rencana program diklat yang akan diadakan untuk tahun depan”.<sup>9</sup>

Perdapat diatas menegaskan bahwasanya penyusunan rencana kerja diklat ini dilakukan setiap satu tahun sekali, dan dilakukan setiap akhir tahun, guna mempersiapkan program diklat yang akan dilaksanakan untuk tahun depan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu komponen penting dalam sebuah perencanaan diklat ialah adanya analisis kebutuhan diklat (*Training Needs Assessment*).

Analisis kebutuhan diklat merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam menentukan kebutuhan diklat yang akan dikembangkan untuk membantu permasalahan yang dihadapi *stage holder* dalam sebuah lembaga pendidikan

---

<sup>9</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2021 Pukul 09.15 WITA.

khususnya bagi tenaga kependidikan madrasah dalam menjalankan pekerjaannya. Sebuah analisis kebutuhan diklat ini digunakan untuk menentukan apakah program diklat tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tenaga kependidikan dalam menjalankan pekerjaannya. Analisis ini dilakukan untuk menentukan jenis program diklat yang akan dikembangkan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zarkani selaku Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis, mendeskripsikan bahwa:

“Analisis kebutuhan diklat dalam pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Balai Diklat Keagamaan dengan cara memonitoring langsung ke tempat, daerah atau wilayah yang akan mengikuti diklat, terdapat beberapa proses analisis diklat yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu instrument kuesioner atau angket yang berisikan peta kebutuhan diklat masing-masing daerah yang kemudian akan dibagikan. Dengan sasaran pejabat struktural, dan alumni peserta diklat. <sup>10</sup>“...Persiapan instrumen kuesioner atau angket yang berisikan peta kebutuhan diklat masing-masing daerah untuk memonitoring kebutuhan diklat”.<sup>11</sup>

Proses analisis di atas, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis menegaskan bahwasanya dilakukan langsung oleh Balai Diklat Keagamaan dengan cara memonitoring langsung ke wilayah yang akan diselenggarakannya diklat. Proses analisis ini ialah pertama, menyiapkan terlebih dahulu instrument kuesioner atau angket yang berisikan peta kebutuhan diklat masing-masing daerah yang akan

---

<sup>10</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2021 Pukul 09.15 WITA.

<sup>11</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2021 Pukul 09.15 WITA.

dibagikan setelahnya, dengan sasaran pejabat struktural dan alumni diklat. Serta dalam persiapannya instrumen kuesioner atau angket ini berisikan tentang peta kebutuhan diklat masing-masing daerah untuk memonitoring kebutuhan diklat.

Seirama dengan hal di atas, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Madrasah juga menyatakan:

“Salah satu proses perencanaan diklat tenaga administrasi ialah dengan membuat TOR atau Kerangka Acuan Diklat, Rapat Persiapan, Pembagian Peserta, membuat jadwal, permohonan pengajar, proses persiapan diklat baik yang dilakukan secara offline, maupun online. Diklat offline ini istilah lainnya ialah diklat yang dilakukan di dalam kampus. Sedangkan diklat online istilah lainnya ialah diklat yang dilakukan di luar kampus atau dilakukan secara jarak jauh (PJJ). Jika diklat dalam kampus maka salah satu persiapannya ialah dengan menyiapkan tempat diklat. Sedangkan diklat di luar kampus (PJJ) ialah dengan mempersiapkan panitia, yang kemudian dalam prosesnya akan dibicarakan semua hal yang berkaitan dengan diklat yakni salah satunya nama pengajar atau widyaiswara, materi, silabus, dsb.<sup>12</sup>

Pendapat Seksi Diklat Tenaga Administrasi Madrasah diatas menegaskan, bahwasanya: Salah satu proses perencanaan diklat tenaga administrasi ialah dengan membuat Kerangka Acuan, Pembagian Peserta, membuat jadwal, permohonan pengajar, serta proses persiapan diklat lainnya. Selain itu, *stakeholder* yang terlibat dalam proses penyelenggaraan diklat juga dapat mengusulkan pelaksanaan diklat di tempat kerja (DDTK) dan dalam

---

<sup>12</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2021, Pukul 11.15 WITA.

pelaksanaannya pun dapat disesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan anggaran diklat.<sup>13</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 menerangkan bahwa: “Pembiayaan diklat dibebankan pada anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Hal serupa juga di utarakan Administrasi Keuangan, pada saat wawancara pribadi yang menerangkan bahwa: “Anggaran penyelenggaraan diklat di balai diklat ini diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Setiap anggaran diklat di beda-bedakan alokasinya sesuai kebutuhan. Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan tergantung dari standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dilihat juga dari jumlah pelaksanaan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, dan besaran honor bagi narasumber dan panitia pelaksanaan. Serta, terdapat dana simpanan yang berguna untuk kegiatan diklat yang sifatnya mendadak. Dana simpanan ini dialokasikan dari perencanaan uang

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama, *Pedoman Penyelenggaraan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), h.10.

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

persediaan (UP) sebagai dana awal untuk kegiatan diklat. Besarnya dana simpanan tergantung dari pengelolaan keuangan. Hal yang menjadi masalah berkaitan dengan dana diklat ialah adanya regulasi yang menyebabkan tidak dibayarkannya honorarium narasumber dari dalam instansi. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menjadikan narasumber dari dalam instansi bukan sebagai tugas pokok dan fungsinya, tetapi sebagai tenaga ahli keprofesian lain”.<sup>15</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) pada Bab VI tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pembiayaan , menerangkan bahwa: “Pembiayaan Diklat Di Tempat Kerja yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan berasal dari DIPA Balai Diklat Keagamaan.”<sup>16</sup> Hal ini serupa dengan pendapat Pengembang sarana prasarana di balai, mengemukakan bahwa: “Anggaran dana diklat bersumber dari DIPA, dalam proses penganggarannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sebelum diklat diselenggarakan.”<sup>17</sup>

Salah satu bentuk kerangka acuan yang ada di Balai Diklat disebut dengan istilah “Kursil”. Kursil disini berisikan tentang segala keputusan, kebijakan yang

---

<sup>15</sup> Ratu Kamaliah, S.Pd.I, Administrasi Keuangan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Tempat Kerja*....,h.10.

<sup>17</sup> Samadi, S.Pd.I, Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, Wawancara pribadi, 01 Februari 2021, Pukul.13:57.

berkaitan dengan Kurikulum diklat, serta rekap kegiatan diklat, dan lain sebagainya. Kursil tahun 2021 (*Lihat dilampiran*).

## 2) Strategi Pembelajaran Diklat

Strategi pembelajaran diklat, merupakan sebuah rencana, metode, serangkaian aktivitas yang direncanakan oleh widyaiswara yang digunakan dalam pembelajaran diklat guna mencapai keberhasilan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan seorang widyaiswara yang ahli dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sebagai instruktur diklat. Maka dari itu, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dimiliki seorang widyaiswara. Hal ini serupa dengan pernyataan Widyaiswara Ahli Muda, yang menyatakan bahwa: “..seorang widyaiswara haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam proses pembelajaran suatu diklat. Widyaiswara yang berkompeten tersebut, meliputi komponen pengelolaan pembelajaran, komponen kepribadian, komponen sosial, dan komponen substansi.<sup>18</sup>”

Pernyataan di atas jelas menegaskan bahwa widyaiswara merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran guna mencapai keberhasilan pembelajaran diklat ini. Tentu, dalam prosesnya diperlukan seorang widyaiswara yang profesional.

---

<sup>18</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Landasan Ulin, 27 Januari 2021 Pukul 10.30 WITA.

Metode diklat merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran diklat. Metode yang digunakan dalam kegiatan diklat biasanya menerapkan cara pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) Sehingga haruslah lebih bervariasi. Hal ini serupa dengan pernyataan Ibu Widyaiswara, yang mengutarakan bahwa:

“...metode yang digunakan dalam pembelajaran diklat sangatlah bervariasi. Dengan menerapkan pembelajaran orang dewasa (*andragogy*). Metode pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, menyenangkan, dinamis, dan fleksible antara peserta diklat dengan widyaiswara. Disini widyaiswara berperan bukan sebagai pengajar atau guru di sekolah. Tetapi, selayaknya widyaiswara berperan sebagai fasilitator yakni orang yang memfasilitasi peserta dalam kegiatan pembelajaran diklat. Mengingat peserta diklat merupakan orang dewasa yang telah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya yang perlu dikembangkan. Sehingga mereka tidak perlu diperlakukan seperti siswa.<sup>19</sup>”

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak Widyaiswara Ahli Muda, yang menyatakan bahwa: “...Diklat adalah sebuah kegiatan yang mayoritas pesertanya adalah orang dewasa, sehingga untuk memberikan pengetahuan kepada orang dewasa harus menggunakan metode yang tepat. Banyak metode yang bisa digunakan saat pelaksanaan sebuah Diklat, diantaranya adalah: ceramah, diskusi, demonstrasi, *Problem Based Learning*, *Role Playing*.<sup>20</sup>”

---

<sup>19</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

<sup>20</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

Hal ini serupa juga diutarakan oleh Bapak Koordinator Widyaiswara, yang mengutarakan bahwa: “Iya, namanya pelatihan orang dewasa (*andragogy*). Maka, metode yang digunakan haruslah mengalami perubahan, tidak harus sama dari sebelumnya yang menyesuaikan dengan latar belakang tiap orang. Metode yang umum, saya digunakan, metodenya ceramah, diskusi, usut kasus, kemudian ada model model pembelajaran lain.<sup>21</sup>”

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwasanya metode pembelajaran diklat yang digunakan balai diklat sangatlah beragam. Mengingat peserta diklat merupakan orang dewasa yang telah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya yang perlu dikembangkan. Sehingga mereka tidak perlu diperlakukan seperti siswa.

### 3) Penyusunan Bahan

Umumnya, kurikulum diklat di lingkungan Kementerian Agama disusun oleh Badan Litbang dan diklat keagamaan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, kompetensi jabatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, norma-norma kehidupan beragama, dan output yang dihasilkan diklat sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, widyaiswara, peserta, dan alumni diklat, tenaga ahli, dan unsur lain yang terkait. Penyusunan dan pengembangan

---

<sup>21</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

kurikulum dilakukan oleh Kurikulum Diklat Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Koordinator Widyaiswara, berdasarkan hasil wawancara diungkapkan bahwa:

“Tahap awal pembuatan materi diklat? “...Widyaiswara ditunjuk menjadi pengajar diklat, kemudian diberikan jadwal dan diberikan silabus. Jadi widyaiswara diminta mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diminta sesuai dengan silabus yang telah diberikan. Harus membuat bahan ajar, garis besar pembelajar yang lebih dikenal dengan RAP/ rencana pengajaran.”<sup>22</sup>”

Pertanyaan selanjutnya:

Apakah terdapat panitia khusus dalam penyusunan materi? Semua materi pengajaran di serahkan kepada widyaiswara, tentu dengan menyesuaikan silabus yang ada. Tugas panitia hanya menyampaikan silabus.

Pertanyaan selanjutnya:

Apakah dalam pembuatan materi diklat terdapat pedoman khusus/ acuannya? Iya, ada, acuan nya adalah silabus.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai penyusunan bahan materi pembelajaran diklat, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan materi itu telah menjadi tugas widyaiswara. Tentulah dengan menyesuaikan acuan yang telah diberikan oleh pihak Kurikulum Diklat Kementerian Agama yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.

---

<sup>22</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

## 2. Pelaksanaan Program Diklat

Sebelum diselenggarakannya program diklat ada salah satu tahapan penting yang wajib diikuti seluruh peserta diklat yakni tahap registrasi. Registrasi merupakan hal penting yang dilakukan semua peserta diklat, hal ini diperlukan untuk memberikan informasi dan merupakan syarat wajib yang diikuti peserta sebagai bukti komitmen peserta dalam mengikuti program diklat baik dilakukan secara online ataupun offline. Hal ini serupa dengan pernyataan Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis, yang menyatakan bahwa:

“.....Sebelum kegiatan diklat dilaksanakan, kami sudah menyiapkan tim panitia registrasi calon peserta diklat. Semua peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi baik dilaksanakan online maupun offline. Registrasi online dapat dilakukan peserta melalui website resmi Balai Diklat Keagamaan atau biasa dikenal dengan istilah aplikasi SIMDIKLAT yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Diklat. Aplikasi ini dilakukan untuk mempermudah panitia pelaksana dalam merekap data calon peserta diklat.<sup>23</sup>”

Pernyataan di atas mempertegas bahwasanya registrasi wajib diikuti semua peserta diklat, sebagai bukti keikutsertaan peserta diklat. Selain registrasi dapat dilakukan secara offline. untuk mempermudah panitia dalam melakukan perekapan data peserta diklat. Maka peserta dapat melakukan registrasi secara online melalui aplikasi SIMDIKLAT. Hal ini membuktikan bahwasanya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dalam penyelenggaraan diklat dari tahap awal perencanaan, hingga pelaksanaan diklat berlangsung. Semua pihak ikut berperan di dalamnya. Hal ini

---

<sup>23</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

membuktikan adanya pembagian tugas dalam penyelenggaraannya. Serupa dengan hal ini Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis menyatakan:

“....Semua pihak berperan penting dalam proses pelaksanaan program diklat. Masing-masing stage holder memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan jobdish yang telah ditentukan sebelumnya. Namun memiliki korelasi atau hubungan antara satu sama lain. Misalnya sajakan kepala balai berperan sebagai penanggung jawab, ketua panitia yang bertanggung jawab atas suksesnya kegiatan diklat, widyaiswara yang bertugas menjadi pembimbing peserta diklat. Tentulah untuk menjalankan tugas dan mencapai keberhasilan penyelenggaraan diklat,. Maka perlu adanya koordinasi antara satu dengan yang lain....<sup>24</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya semua *stage holder* memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan diklat. Baik itu pimpinan diklat, ketua panitia, panitia, dan yang lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam keberhasilan penyelenggaraan diklat. Karena, semua pihak telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisi atau jabatan yang diembannya. Untuk itulah penting adanya koordinasi, kolaborasi antar satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan diklat tersebut.

Diklat merupakan sebuah upaya dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan keterampilan pegawai guna mempermudah pegawai dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sesuai dengan posisi, jabatan yang diemban. Khususnya tenaga kependidikan madrasah yang mempunyai tugas penting dalam proses pengelolaan

---

<sup>24</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

atau pengadministrasian lembaga pendidikan. Oleh karena itu untuk memperoleh keberhasilan tenaga kependidikan dalam mengelola dan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. Tentu saja penting adanya bimbingan, wawasan pengetahuan tentang managerial atau pengelolaan madrasah yang efektif itu seperti apa. Kemampuan dan keterampilan managerial tersebut akan didapat dengan mengikuti diklat. Hal ini serupa dengan pendapat Seksi Tenaga Administrasi, yang menyatakan:

“Diklat merupakan kepanjangan dari pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk membantu tenaga administrasi madrasah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.. Diklat sangatlah penting bagi tenaga kependidikan madrasah. Karena dengan adanya diklat kita dapat mendapatkan informasi tentang perkembangan peraturan, kebijakan baru yang menjadi syarat khusus bagi pns, calon pns, bagi pejabat serta diangkatnya posisi jabatan tertentu”.<sup>25</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya diklat merupakan salah satu upaya penting yang diselenggarakan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan tenaga kependidikan madrasah agar mempermudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola madrasah. Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan kemampuan tenaga kependidikan madrasah diperlukan program diklat yang berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan madrasah. Salah satu lembaga penyelenggaraan diklat ialah Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

---

<sup>25</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pegawai Pada Kementerian Agama, menyatakan bahwa:

“Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan Diklat Administrasi, Diklat Teknis Pendidikan dan Diklat Teknis Keagamaan bagi pegawai di wilayah kerja masing-masing dengan berpedoman kepada Kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Balai Diklat Keagamaan”.<sup>26</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwa Balai Diklat Keagamaan merupakan lembaga khusus penyelenggaraan diklat yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang berlandaskan kepada Kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) dan Balai Diklat Keagamaan. Salah satu diklat yang diselenggarakan disini ialah Diklat Administrasi, Diklat Teknis Pendidikan dan Diklat Teknis Keagamaan bagi pegawai di wilayah kerja masing-masing. Seiring dengan itu deskripsi mengenai Balai Diklat Keagamaan.

Hal di atas, seirama dengan pendapat Widyaiswara Ahli Muda, yang menyatakan: “...Diklat Tenaga Administrasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi. Seksi Diklat Tenaga Tekhnis Pendidikan dan Kegamaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.”<sup>27</sup>”

---

<sup>26</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, Pasal 1, Nomor 28, Nomor h.8.

<sup>27</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa Diklat Tenaga Administrasi lah yang memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan madrasah. Serta seksi diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan yang berkewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan keagamaan. Hal ini juga serupa dengan pernyataan Seksi Balai Diklat Tenaga Administrasi berpendapat mengenai jenis-jenis program diklat bagi tenaga kependidikan madrasah, yang menyatakan bahwa: "...berdasarkan permasalahan yang dihadapi tenaga kependidikan madrasah dalam menjalankan tugasnya. Maka, salah satu jenis program diklat yang sesuai dengan tenaga kependidikan madrasah ialah diklat tata naskah dinas, etos kerja, pengelolaan keuangan, Barang dan Jasa, Pengelolaan atau manajemen madrasah, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>"

Pernyataan di atas menegaskan jenis program diklat yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan madrasah ialah diantaranya diklat tata naskah dinas, etos kerja, pengelolaan keuangan, barang dan jasa, pengelolaan atau manajemen madrasah, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya pelaksanaannya, diklat dapat dilaksanakan secara klasikal yakni proses diklat yang dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi diklat. Sedangkan, non klasikal proses diklat yang dilakukan secara tidak langsung. Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang melanda

---

<sup>28</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

berbagai wilayah Indonesia. Sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin untuk saat ini tidak melaksanakan diklat secara langsung (*klasikal*) yang biasa dilaksanakan selama ini. Maka pimpinan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin mengambil kebijakan untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara diklat dengan menyelenggarakannya melalui metode non klasikal dengan memanfaatkan media Informasi Teknologi yakni berupa pelatihan jarak jauh(pjj).

Hal ini serupa dengan pernyataan Widyaiswara Ahli Muda, yang menyatakan bahwa:... “Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan aktifitas lebih banyak dilakukan dirumah, maka pendidikan dan pelatihan pun juga dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan jarak jauh(pjj) Untuk melaksanakan kegiatan PJJ, SDM Diklat dituntut untuk mengetahui dan menguasai teknologi informasi. Masih ada SDM Diklat yang belum familiar dengan sistem PJJ.<sup>29</sup>”

Pernyataan diatas menegaskan bahwasanya sebagai antisipasi adanya pandemi covid-19. Maka, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan pendidikan jarak jauh (pjj). Untuk keberhasilan pelaksanaan pjj, maka *stage holder* dituntut mengenal dan mahir dalam

---

<sup>29</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

pengelolaan teknologi informasi. Namun, realitanya masih banyak *stage holder* yang masih belum mengenal sistem yang digunakan pjj.

Agar pjj dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar maka para penyelenggaraan pelatihan seperti panitia pelaksana dan widyaiswara harus mempersiapkan terlebih dahulu kemampuan dan penguasaan teknologi berupa aplikasi-aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sejak tanggal 22 hingga 24 juni 2020 Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin menyelenggarakan bimbingan teknis pelatihan jarak jauh (Bimtek pjj). Peserta Bimbingan teknis pelatihan jarak jauh yang terdiri dari para widyaiswara dan JFU atau staf. Melalui bimtek para peserta akan dilatih menggunakan aplikasi pembelajaran, pelaksanaan diskusi interaktif, cara mengisi materi-materi pembelajaran, membuat kuis ujian, membuat penilaian, dan penerapan pembelajaran lainnya.<sup>30</sup>

Tentulah, dalam pelaksanaan Pelatihan jarak jauh ini, peserta pun juga ditantang untuk menguasai teknologi untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Jika peserta tidak memenuhi hal ini maka bisa menjadi kendala atau penghambat dalam proses pelaksanaan diklat. Seirama dengan upaya yang dilakukan balai dengan mengadakan bimtek pelatihan jarak jauh (pjj). Widyaiswara Ahli Umum juga mengemukakan bahwa: "...Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka

---

<sup>30</sup> Dikutip pada <https://bdkbanjarmasin.kemendiknas.go.id/berita/bimtek-pelatihan-jarak-jauh-pjj-pada-bdk-banjarmasin>, "BIMTEK Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) pada BDK Banjarmasin, 31/01/2021 Pukul 11.59 WITA.

usaha yang dilakukan adalah dengan mengadakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) PJJ.<sup>31</sup>”

Pernyataan di atas memiliki kesamaan dengan solusi yang ditawarkan balai diklat, selaku penyelenggara diklat saat mengantisipasi berbagai hambatan atau kendala yang mungkin saja terjadi saat pelaksanaan pelatihan jarak jauh(pjj). Untuk mencapai keberhasilan proses penyelenggaraan diklat. Seirama dengan hal tersebut, mengenai kendala yang dihadapi balai dalam proses penyelenggaraan diklat. Maka, widyaiswara bagian umum juga, menyatakan: “....Jelas, mempunyai keahlian dalam mengoperasikan teknologi menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi calon peserta diklat. Tentu yang lainnya menyesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti...<sup>32</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa kemampuan, keahlian yang dimiliki calon peserta pendidikan dan pelatihan dalam menggunakan teknologi, ini menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Untuk itu peserta ditantang untuk menguasai teknologi. Hal ini serupa dengan pendapat Seksi Diklat Administrasi yang menyatakan:

“....kebanyakan peserta masih gagap teknologi sehingga menyebabkan kurangnya keaktifan peserta dalam proses pelaksanaan diklat ini. Salah satu antisipasi yang dilakukan panitia ialah dengan adanya surat pernyataan kesanggupan mengikuti diklat dengan batas waktu yang ditentukan. Serta sudah

---

<sup>31</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

<sup>32</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

memenuhi syarat kesanggupan dalam menguasai teknologi, jika tidak sanggup maka peserta telah diberi peringatan untuk mundur di awal agar peserta dapat diganti dengan peserta lainnya.<sup>33</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan diklat ialah masih banyaknya peserta yang gagap dalam menggunakan teknologi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut panitia telah memberikan informasi syarat wajib yang harus dipenuhi peserta dalam mengikuti diklat ialah penguasaan keterampilan mengoperasikan teknologi.

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwasanya dalam pelaksanaan diklat di balai telah terlaksana secara efektif dan efisien. Dilihat dari pelaksanaannya yang menyesuaikan dengan kondisi, situasi yang terjadi di lapangan. Salah satunya ialah bentuk upaya yang dilakukan balai dengan tetap menyelenggarakan diklat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui pelatihan jarak jauh (pjj) yang merupakan bentuk upaya yang dilakukan balai dalam antisipasi atau pencegahan penyebaran pandemi covid-19, salah satu kendala dalam pelaksanaan diklat ini ialah masih banyaknya peserta yang gagap teknologi. Namun, hal ini dapat di atasi balai dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelatihan jarak jauh(pjj).

---

<sup>33</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

### 3. Evaluasi Diklat

Evaluasi merupakan upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu kegiatan untuk kemungkinan pelaksanaan dan pengembangan. Sedangkan evaluasi diklat merupakan sebuah alat yang dapat mengukur dan mengetahui apakah suatu program diklat telah mencapai sasaran yang diharapkan dengan penekanan pada aspek hasil *output*, serta mengukur apakah program diklat tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien.<sup>34</sup> Selanjutnya, *stuffle beam* mengemukakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan dalam merancang, mengumpulkan, melaporkan, menerapkan informasi untuk memutuskan nilai dan kegunaan dari sebuah objek.

Selanjutnya, Townsend dan Donovan mengemukakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses untuk menemukan apakah biaya, waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk mendesain dan menyelenggarakan sebuah program pelatihan mempunyai nilai bagi sebuah organisasi atau perusahaan.<sup>35</sup> Tentunya dalam melaksanakan evaluasi diklat ini, memerlukan proses yang panjang untuk mengelolanya agar berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini serupa dengan hasil wawancara, dengan beberapa narasumber di bawah ini:

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Diklat, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), h.2.

<sup>35</sup> Benny A. Pribadi, *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.146-147.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Diklat Teknis, yang menyatakan:

“Siapa yang bertugas mengontrol dan memantau kegiatan diklat? ..”Seluruh manajemen structural di lingkungan Balai Diklat Keagamaan, pengontrolan dilakukan dengan turun langsung ke daerah kemudian meminta informasi dgn panitia yg ada, & menggali informasi dari masing-masing daerah tentang bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ini.<sup>36</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam melakukan pengontrolan dan pemantauan kegiatan diklat seluruh manajemen struktural yang berada di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin lah yang bertugas melakukan pengontrolan dan pemantauan kegiatan diklat ini, yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah, wilayah tempat diklat diselenggarakan. Kemudian, setelahnya balai diklat menggali kembali informasi dengan panitia yang ada di masing-masing daerah tentang bagaimana proses pelaksanaan kegiatan diklat berlangsung. Selanjutnya, Kepala Seksi Diklat Teknis juga menerangkan beberapa hal yang pihak yang terlibat dalam proses evaluasi, yakni sebagai berikut: “Siapa yang mengevaluasi dalam manajemen diklat? Kepala balai, manajemen structural, dan widyaiswara. Melalui proses analisis blangkon informasi yang diedarkan.<sup>37</sup>”

Menegaskan bahwasanya evaluasi diklat dilakukan melalui proses analisis blangko informasi yang diedarkan. Dalam pelaksanaannya kepala balai, manajemen

---

<sup>36</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

<sup>37</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

struktural, dan widyaiswaralah yang bertugas melakukan evaluasi diklat. Selain itu, salah satu cara melakukan evaluasi ini ialah dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal ini dilakukan dengan cara mengedarkan langsung kuesioner yang harus diisi peserta diklat. Sedangkan, secara informal ini dilakukan melalui diskusi langsung antara peserta dengan panitia, dan diskusi panitia dengan pimpinan atau atasan alumni diklat bekerja, serta dengan teman sejawatnya.<sup>38</sup> Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Narasumber Seksi Diklat Administrasi, yang menyatakan bahwa:

“Proses evaluasi diklat? Pertama, melalui rapat dengan membicarakan kendala yang ditemukan di lapangan. Kedua, melalui evaluasi juga dapat dilakukan langsung, dengan datang langsung ke tempat/ wilayah masing” alumni diklat untuk melakukan evaluasinya yakni dengan menanyakan langsung dengan teman sejawat, pimpinan/ atasan alumni bekerja, bagaimana hasil dari diklat yang telah dijalankan sebelumnya, apakah ada manfaat dan perkembangan yang dirasa”.<sup>39</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan evaluasi diklat diantaranya ialah pertama, dilaksanakan melalui rapat dengan membicarakan kendala yang terjadi di lapangan sehingga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diklat. Kedua, evaluasi dapat dilakukan secara langsung, dengan datang langsung ke tempat wilayah kerja masing-masing diklat, dengan cara menggali informasi langsung dengan teman sejawat, pimpinan, atau atasan bagi

---

<sup>38</sup> I Komang Ardana, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.103.

<sup>39</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

alumni yang bekerja. Serta bagaimana perubahan yang terjadi dari hasil diselenggarakan diklat yang telah dijalankan sebelumnya, dan manfaat, serta perkembangan yang dirasa. Kemudian narasumber juga menerangkan:....“Siapa evaluasi? Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi, sebagian evaluasi dilakukan langsung oleh panitia khusus melalui wilayah/ tempat peserta diklat. Salah satu panitia khusus yang bertugas dalam melakukan evaluasi yakni terdiri dari panitia, pejabat, dan widyaiswara.<sup>40</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya evaluasi ini dapat dilakukan secara terkoordinasi, dan dilakukan secara langsung oleh panitia khusus yang bertugas melalui wilayah atau tempat peserta diklat. Salah satu panitia khusus disini ialah panitia, pejabat, dan widyaiswara. Selanjutnya narasumber juga menerangkan mengenai komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan evaluasi diklat, yang menyatakan:

“Komponen menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi? Perkembangan pengetahuan, keterampilan peserta diklat dapat dilihat dari keberhasilan peserta dalam mempraktekkan ilmunya saat bekerja, dan dalam kehidupan sehari-hari, serta adanya transfer ilmu yang dilakukan peserta dengan teman sejawatnya. Jadi tolak ukuran keberhasilan diklat dilihat dari output yang telah dihasilkan tiap peserta.<sup>41</sup>”

---

<sup>40</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

<sup>41</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya terdapat beberapa komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan diklat, salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan peserta dalam mempraktekkan ilmunya saat bekerja, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta adanya transfer ilmu yang dilakukan peserta dengan teman sejawat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan narasumber Koordinator Widyaiswara, yang menyatakan:

“Evaluasi diklat? Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk soal pertanyaan, menganalisis pengetahuan peserta, sikap peserta. Terdapat dua jenis evaluasi, yakni evaluasi pembelajaran diklat, dan evaluasi pelatihan. Serta Standarnya evaluasi diklat yang ada di BDK dapat dilakukan secara offline, dan online”. “Tolak ukur keberhasilan peserta diklat? BDK telah memiliki standar khusus dalam penilaian peserta yang dilakukan panitia”.<sup>42</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya evaluasi diklat ini dapat dilakukan melalui soal-soal yang berisikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan sikap peserta diklat. Terdapat dua jenis dalam proses evaluasi diklat yaitu evaluasi pembelajaran diklat, dan evaluasi pelatihan. Serta, evaluasi ini dapat dilakukan secara langsung atau offline dan online. Serta terdapat standar khusus dalam penilaian peserta yang dilakukan panitia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber ibu widyaiswara, yang menyatakan:

“Evaluasi yang dilakukan widyaiswara kepala peserta diklat? Terdapat beberapa cara yang dilakukan widyaiswara dalam mengevaluasi peserta diklat. Diantaranya ialah dengan melalui post test, pre test yang hasil kemudian dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana daya serap peserta terhadap materi diklat yang telah diberikan. Selain dilakukan secara langsung atau tatap muka, evaluasi ini juga

---

<sup>42</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

dapat dilakukan secara online. Pada diklat jarak jauh (PJJ), evaluasi dilakukan secara online dengan melihat keaktifan peserta saat proses diklat berlangsung, hal dapat dilihat dari seberapa sering peserta dalam membuka/ menyimak materi diklat secara online di aplikasi pembelajaran diklat jarak jauh (SIMDIKAT). Selain itu, BDK juga melakukan evaluasi pasca diklat, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau manfaat dari diklat yang telah diikuti sebelumnya. Evaluasi pasca diklat dilakukan secara langsung dengan mendatangi beberapa kota/wilayah kerja BDK Kalsel, yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara yang bertujuan untuk melakukan evaluasi secara langsung dengan menanyakan langsung dampak perubahan yang terjadi pasca diklat dengan pimpinan, teman sejawat alumni diklat.<sup>43</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya terdapat beberapa cara yang dilakukan widyaiswara dalam mengevaluasi peserta diklat, yakni diantaranya ialah dengan melalui post test, pre test yang berguna untuk mengukur sejauhmana daya serap peserta terhadap materi diklat yang telah diberikan. Evaluasi online melalui diklat jarak jauh (PJJ) yang dilakukan untuk melihat keaktifan peserta saat proses diklat berlangsung, yang dapat dilihat dari seberapa sering peserta dalam membuka atau menyimak materi diklat secara online di aplikasi pembelajaran diklat jarak jauh (SIMDIKAT), evaluasi pasca diklat, yang dilakukan secara langsung dengan menanyakan langsung dampak perubahan yang terjadi pasca diklat dengan pimpinan, teman sejawat alumni diklat. Selain pernyataan di atas, narasumber juga menerangkan mengenai tolak ukur keberhasilan diklat, yang menyatakan:

“Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan peserta diklat? Tolak ukur keberhasilan diklat dapat dilihat dari adanya perubahan signifikan yang terjadi pada peserta diklat. Perubahan ini diantaranya ialah perubahan perilaku peserta

---

<sup>43</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

(*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*). Tolak ukur keberhasilan diklat ini berbeda-beda tiap peserta, tergantung bagaimana peserta dalam menyerap pengetahuan, dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Tolak ukur keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh mana diklat ini dapat memberikan dampak perubahan kepada peserta, misalnya saja peserta yang kurang terampil dalam berkomunikasi, yang mengikuti diklat publik speaking, dan kemudian setelah diklat, terjadi dampak/perubahan yang dirasa peserta pada caranya dalam berkomunikasi”.<sup>44</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan diklat dapat terlihat dari adanya perubahan *signifikan* yang terjadi pada peserta diklat yakni perubahan perilaku peserta (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*). Tolak ukur keberhasilannya dapat dilihat dari adanya dampak atau perubahan yang dialami peserta diklat.

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas, maka dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan diklat di balai telah terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan balai dalam menyelenggarakan diklat. Keberhasilan ini terlihat dari dampak atau perubahan yang di dapat peserta setelah mengikuti diklat di balai yaitu keberhasilan peserta dalam mempraktekkan ilmunya saat bekerja, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta adanya transfer ilmu yang dilakukan peserta dengan teman sejawat. Evaluasi di balai ini telah terlaksana secara terkoordinasi, dan dilakukan secara langsung oleh panitia khusus yang

---

<sup>44</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

bertugas dengan melalui wilayah kerja atau tempat peserta diklat. Salah satu panitia khusus disini ialah panitia, pejabat, dan widyaiswara.

#### **4. Pelaporan Diklat**

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, menyatakan bahwa: “Laporan merupakan salah satu dari jenis naskah dinas. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian”.<sup>45</sup> Sedangkan, menurut Paramita Atuningtyas, pelaporan diklat merupakan media pertanggung jawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan, pencapaian, dan analisis keberhasilan atau kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat.<sup>46</sup> Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian penyelenggaraan diklat. Sejatinnya pelaporan merupakan pertanggung jawaban formal yang harus dilakukan oleh pengelola atas berbagai sumberdaya yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat. Dokumen laporan diklat sendiri merupakan bukti tertulis atau portofolio yang menegaskan bahwa diklat telah selesai diselenggarakan sesuai dengan rancangan. Oleh sebab itu, isi laporan harus tersusun secara sistematis dan berisi informasi rinci teknis tentang 5W+1H atau

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, *Pedoman Penyusunan Laporan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h.1.

<sup>46</sup> Paramita Ayuningtyas, *Skripsi Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2009), h.39.

SiABiDiBa+M dari rancangan dan penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan serta hasilnya. Dengan demikian isi laporan merupakan panduan dari isi Kerangka Acuan dan Panduan yang dilengkapi dengan informasi tentang pelaksanaan dan hasil implementasi rancangan diklat.<sup>47</sup> Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan beberapa Narasumber di bawah ini, sebagai berikut: Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Narasumber Widyaiswara, yang menyatakan:

“Bagaimana widyaiswara dalam melakukan pelaporan diklat? Pelaporan dilakukan widyaiswara setiap saat atau setiap hari. Pelaporan ini meliputi program diklat sedang dijalankan, materi diklat, dan perkembangan diklat sejauh mana (tingkat efektif & efisiensi), dan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan/ proses diklat. <sup>48</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa widyaiswara melakukan pelaporan diklat secara update, yakni biasanya dilakukan setiap hari. Pelaporan ini meliputi program diklat yang sedang berlangsung, materi pembelajaran diklat, serta perkembangan diklat, dan berbagai hal yang berkaitan selama proses diklat berlangsung.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Narasumber Kepala Seksi Diklat Teknis, yang menyatakan:

“Bagaimana Proses pelaporan diklat? Apakah dilakukan secara online/offline? Dilakukan secara offline atau secara langsung, bentuk laporan offline dapat berupa laporan”. Kemudian secara online disampaikan ke pusat Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan Kementerian

---

<sup>47</sup> Abdorrahman Gintings, *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan: Esensi Praktis*, (Bandung: Humaniora Utama Press), h.61.

<sup>48</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

Agama Jakarta. Dalam proses pelaporan ini peserta akan mendapatkan sertifikat'', bahan' ajar dalam proses pembelajaran.<sup>49''</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya pelaporan diklat ini dapat dilakukan secara offline (langsung) dan online (tidak langsung). Laporan secara offline dapat berupa laporan fisik. Sedangkan secara online dapat berupa soft copy atau file laporan yang akan disampaikan kepada pusat Badan Pelatihan dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan Kementerian Agama Jakarta. Serta peserta juga akan mendapatkan sertifikat, bahan ajar dalam proses pembelajaran diklat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Narasumber Seksi Diklat Tenaga Administrasi, yang menyatakan:

“Bagaimana proses pelaporan diklat? Pelaporan sistemnya ada laporan persiapan terlebih dahulu yang dilakukan. Laporkan pada atasan di badan diklat dan pus diklat. Sebelum dilakukannya kegiatan, maka kita melakukan laporan persiapan terlebih dahulu, yang akan dikirimkan ke pus diklat dan badan litbang. Sesudah pelaksanaan diklat kita membuat laporan evaluasi, yang berisikan semua kegiatan diklat yang dijadikan dalam bentuk laporan hard copy nya. Jadi pelaporan dilakukan secara offline yakni dengan adanya dokumen hard copy nya, dan soft file yang akan dikirimkan secara online. Namun, dilihat dari efesiensinya, laporan dikirimkan secara online, yakni dengan bentuk soft file.<sup>50''</sup>

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya sistem pelaporan diklat meliputi laporan persiapan, laporan pada atasan di badan diklat dan pus diklat, serta laporan sesudah pelaksanaan diklat yang dapat dilakukan secara offline yakni dengan

---

<sup>49</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

<sup>50</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

adanya dokumen hard copy nya, dan soft file yang akan dikirimkan secara online. Namun, dilihat dari efisiensinya, laporan dikirimkan secara online, yakni dengan bentuk soft file. Selain itu, widyaiswara juga memiliki tugas pelaporan selama proses pembelajaran diklat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara Koordinator Widyaiswara, yang mengungkapkan:

“Proses pelaporan diklat? Secara umum Widyaiswara tugasnya hanya memberikan pembelajaran, pengevaluasian pelatihan, penilaian, membuat RAP, surat tugas dan surat telah melaksanakan tugas. Namun salah satu bentuk pelaporan widyaiswara ialah dengan pembuatan surat tugas, surat melaksanakan kegiatan, bahan tayang, bahan ajar.<sup>51</sup>”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam proses pembelajaran diklat widyaiswara bertugas memberikan pembelajaran, pengevaluasian pelatihan, penilaian, membuat RAP, surat tugas, dan surat telah melaksanakan tugas. Salah satu bentuk pelaporan yang dilakukan widyaiswara ialah dengan pembuatan surat tugas, surat melaksanakan kegiatan, bahan tayang, dan bahan ajar.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwasanya proses pelaporan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini mengacu pada pedoman khusus yang telah ditetapkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah Dinas Kementerian Agama, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan keseragaman dalam penyajian laporan pelaksanaan kegiatan diklat di Balai Diklat Keagamaan. Dilihat dari efisiensinya,

---

<sup>51</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

pelaporan dilakukan secara online, yakni dengan mengirimkan laporan secara online dalam bentuk soft file.

## **5. Faktor Penunjang dan Penghambat Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam proses penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widyaiswara mengenai hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran diklat, yang menyatakan bahwa: “Hambatan dan kendala yang dihadapi widyaiswara?...Hambatan yang sering terjadi ialah pada saat pelatihan jarak jauh(PJJ), dimana peserta diklat mengalami kesulitan dan kendala sinyal yang lelet...<sup>52</sup>”

Menegaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan diklat, yang sering dialami peserta diklat yakni lambatnya akses internet atau sinyal yang lelet pada saat Pelatihan jarak jauh(PJJ) berlangsung. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Widyaiswara Ahli Muda mengenai hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran diklat, yang menyatakan bahwa

---

<sup>52</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

“Apa saja masalah yang ditemukan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia diklat? Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan aktifitas lebih banyak dilakukan dirumah, maka pendidikan dan pelatihan pun juga dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan jarak jauh(PJJ). Untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan jarak jauh(PJJ), Sumber Daya Manusia Diklat dituntut untuk mengetahui dan menguasai teknologi informasi. Masih ada Sumber Daya Manusia Diklat yang belum familiar dengan sistem pelatihan jarak jauh (PJJ).<sup>53</sup>”

Menegaskan bahwa salah satu hal yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan diklat ialah berkaitan dengan kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang belum menguasai teknologi informasi, yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki *stage holder* yang mengikuti diklat secara online atau pelatihan jarak jauh (PJJ). Untuk melaksanakan pelatihan jarak jauh (PJJ) inilah, *stage holder* dituntut untuk lebih menguasai teknologi informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu solusi yang dilakukan balai ialah dengan mengadakan bimbingan teknis Pelatihan jarak jauh(PJJ). Hal ini serupa dengan dengan hasil wawancara yang diutarakan narasumber, yang menyatakan: “Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka usaha yang dilakukan adalah dengan mengadakan Bimbingan Teknis pelatihan jarak jauh (Bimtek pjj)

Menegaskan salah satu usaha yang dilakukan balai diklat untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka balai selaku penyelenggara diklat

---

<sup>53</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

mengadakan pelatihan, atau bimbingan kepada seluruh stage holder yang mengalami masalah dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut. Bimbingan ini disebut dengan istilah bimbingan teknis pelatihan jarak jauh (bimtek pjj).

Selain permasalahan teknis dalam pengoperasian teknologi informasi, yang menjadi salah satu faktor penghambat penyelenggaraan diklat. Dalam penyelenggaraannya juga terdapat faktor lain yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan diklat, yakni diantaranya ialah kurangnya peserta yang dikirimkan tiap daerah yang mengikuti diklat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara Bapak Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis mengenai hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran diklat, yang menyatakan bahwa:

“Apa saja yang menjadi penghambat manajemen diklat? 1) Kendala Pelatihan jarak jauh(PJJ), sinyal yang lelet. 2) Proses Persiapan peserta di tiap daerah yang kadang telat yang menyebabkan kurangnya peserta. Bentuk antisipasi dari kendala tersebut: 1) memberikan informasi mengenai kendala yang akan terjadi akibat sinyal, menggali informasi yang tertinggal melalui bantuan teman yang sinyalnya tinggi. 2) memberikan informasi tenggang batas waktu pengiriman data peserta yang akan mengikuti diklat untuk menghindari kurangnya data peserta.<sup>54</sup>”

Menegaskan bahwa kendala yang sering terjadi dalam proses pembelajaran diklat diantaranya ialah pertama, jaringan internet yang lelet dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh(PJJ), kedua, kurangnya peserta diklat, yang disebabkan karena kurangnya persiapan daerah yang mengirimkan peserta diklat. dan lain sebagainya.

---

<sup>54</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

Selain itu, hambatan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan pelatihan jarak jauh(PJJ) ialah berasal dari cara penyampaian yang dilakukan dengan virtual meeting dan bahan ajar yang harus disesuaikan. Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Koordinator Widyaiswara, mengenai hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran diklat, yang menyatakan:

“Apa saja kendala dan hambatan bapak selaku widyaiswara? Hambatan yang dirasakan pjj, ialah cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan virtual meeting, dan bahan ajar yang menyesuaikan, serta kita belum memiliki modul scr virtual, sinyal, dsb. hambatan lainnya ialah latar belakang tiap peserta yang berbeda, dilihat dari usia, budaya, dsb. sehingga tipe belajar tiap orang berbeda.<sup>55</sup>”

Menegaskan bahwa hambatan yang sering dirasakan dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh(PJJ) ini berasal dari penyampaian yang dilakukan secara online dengan virtual meeting dan bahan ajar yang menyesuaikan, belum adanya modul secara virtual, sinyal, dan latar belakang tiap peserta yang berbeda-beda, yang dilihat dari budaya, usia, gaya belajar, dan lain sebagainya. Selain beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan diklat, balai diklat juga memiliki beberapa keunggulan, yakni mulai dari sarana dan prasarana yang lengkap, instruktur atau widyaiswara yang ahli, serta terdapatnya banyak program diklat yang sesuai dengan kebutuhan peserta diklat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa: “Apakah BDK sudah memenuhi kebutuhan peserta diklat? Terdapat dua seksi pelatihan yakni Pelatihan

---

<sup>55</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

administrasi, pelatihan teknis pendidikan keagamaan yang berada di lingkup keagamaan. Rata-rata program diklat lengkap”.<sup>56</sup>

Menegaskan bahwa Tentulah, dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang proses pelaksanaan diklat. Sehingga perlu adanya standar kualitas sebagai penjamin mutu penyelenggaraan diklat. Hal ini serupa dengan dengan hasil wawancara di bawah ini, yang menyatakan bahwa: “...Apakah sarana dan prasarana sudah memadai? BDK sudah memiliki standar mutu sarana dan prasarana yang memadai.

Pernyataan di atas menegaskan bahwasanya dalam penyelenggaraannya Balai Diklat telah memiliki standar mutu kualitas sarana prasarana yang lengkap. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan diklat selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta Balai juga mendapatkan fasilitas selama proses diklat berlangsung, seperti bahan ajar, bahan tayang, makalah, dan bahan bahan lain yang diperlukan. Selain itu, juga terdapat sarana dan prasana yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran diklat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Widyaiswara Ahli Muda mengenai sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran diklat, yang menyatakan bahwa:

Apa saja sarana yang diperlukan pada saat pelayanan diklat dilakukan? Untuk melaksanakan suatu Diklat, maka sarana yang diperlukan adalah ruang belajar yang dilengkapi meja, kursi, sound system, LCD, dan dengan adanya pjj, maka

---

<sup>56</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

sarana yang diperlukan adalah perangkat yang bisa melaksanakan PJJ (LMS = *Learning Management System*).<sup>57</sup>”

Menegaskan bahwa sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran diklat ialah ruang belajar yang dilengkapi meja, kursi, sound system, LCD, dan dengan adanya pelatihan jarak jauh(pjj) sarana yang diperlukan LMS (*Learning Management System*). Selain sarana yang memadai, dalam penyimpanan berkas atau arsip di Unit Diklat Tenaga Administrasi Madrasah ini tersimpan dengan baik.

Hal ini serupa dengan pernyataan narasumber, yang menyatakan:

“Bagaimana penyimpanan berkas atau arsip di Unit Diklat Tenaga Administrasi Madrasah? Berkas atau arsip yang ada di seksi Diklat Tenaga Administrasi disimpan di ruangan seksi Diklat Tenaga Administrasi, ketika sudah sampai waktu retensi arsip, maka berkas atau arsip yang ada di Seksi Diklat Tenaga Administrasi diserahkan kepada unit arsip (*arsiparis*).<sup>58</sup>”

Menegaskan bahwa penyimpanan berkas yang ada di seksi Diklat Tenaga Administrasi ini disimpan di ruangan khusus yakni ruang seksi Diklat Tenaga Administrasi, ketika sudah sampai waktu retensi arsipnya, maka berkas atau arsip yang tersedia ini di serahkan kepada unit arsip (*arsiparis*). Selain itu juga terdapat program diklat terkhusus bagi tenaga kependidikan madrasah yang diberikan oleh widyaiswara, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan narasumber, yang menyatakan bahwa: “Bentuk diklat administrasi sekolah? Secara umum

---

<sup>57</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

<sup>58</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

widyaiswara memberikan bimbingan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Misalnya saja analisis pendidikan, administrasi sekolah, keadministrasian, keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>”

Menegaskan bahwa setiap widyaiswara memberikan pembelajaran, bimbingan kepada peserta sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Misalnya saja pendidikan, administrasi sekolah dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat indikator atau kriteria khusus yang harus dimiliki lembaga diklat yang unggul. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis mengenai hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran diklat, yang menyatakan bahwa:

“Lembaga diklat yang unggul seperti apa? lembaga diklat yang unggul memiliki indikator atau ciri-ciri diantaranya lembaga yang memiliki fasilitas penunjang dalam pembelajaran diklat, baik dari segi sarana dan prasarana, pengajar atau widyaiswara, dan output yang dihasilkan. Sehingga menjadi satu kebutuhan orang mengikuti pelatihan tersebut.<sup>60</sup>”

Menegaskan bahwa keunggulan lembaga diklat dapat dilihat dari kriteria, atau karakteristik yang dimilikinya yaitu diantaranya fasilitas penunjang yang dapat membantu dalam proses pembelajaran diklat, sarana dan prasarana yang memadai, serta widyaiswara yang ahli, dan output yang akan dihasilkan. Sehingga menjadi

---

<sup>59</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

<sup>60</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

salah satu kebutuhan bagi peserta yang mengikuti diklat. Selain itu, salah satu yang menjadi corak khas yang dimiliki balai diklat ialah merupakan lembaga diklat yang bernuansa islami. Hal ini serupa dengan pernyataan narasumber, yang menyatakan bahwa: “Pembeda balai diklat dengan lembaga diklat lainnya? Pertama, bernuansa islami, intinya bagaimana membentuk nilai’ karakter Aparatur Sipil Negara, menjadi seorang Aparatur Sipil Negara yang professional yang dilandasi dengan nilai’ keagamaan.<sup>61</sup>”

Menegaskan bahwa corak khas yang dimiliki balai ialah termasuk lembaga diklat yang bernuansa keislaman, yang menghasilkan seorang Aparatur Sipil Negara yang professional yang berlandaskan nilai keislaman. Selain corak khas yang dimilikinya, balai diklat juga memiliki keunggulan dan kelebihan salah satu ialah strategi unggulan dalam kegiatan diklat. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan narasumber mengenai kelebihan dan keunggulan balai diklat, yang menyatakan bahwa: “Kelebihan dan keunggulan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin? Terdapat beberapa strategi kegiatan. Pertama, secara regular atau konvensional: seluruh peserta dipanggil Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, kedua, WDWK (pelatihan di wilayah tempat kerja) karena wilayah balai diklat kalsel yang meliputi empat provinsi yakni kalsel, kaltim, kalut, kalteng. Maka tim BDK kedaerah’ untuk

---

<sup>61</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

melatih tenaga kementerian agama. Ketiga, PJJ (Pelatihan Jarak Jauh), pelatihan yang dilakukan secara online. Keempat, strategi unggulan kegiatan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yakni Diklat kerjasama (DKS) merupakan sesuatu yang dinantikan orang. Dimana stage holder yang ingin pegawainya meningkatkan kompetensi pihak sekolah mengundang Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dalam mengisi atau memberikan Diklat.<sup>62</sup>

Menegaskan bahwa kelebihan dan keunggulan yang dimiliki balai diklat, ini terlihat dari strategi kegiatan diklat yang bervariasi. Pertama, secara reguler atau konvensional, strateginya seluruh peserta dipanggil balai diklat. Kedua, WDWK (pelatihan di wilayah tempat kerja) yang dilakukan diberbagai wilayah kerja balai diklat yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Serta strategi unggulan yang dimiliki balai diklat ialah Diklat Kerjasama (DKS).

Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai faktor penunjang dan penghambat penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini telah mempunyai standar mutu tersendiri dalam penyelenggaraan diklatnya, hal ini dilihat dari kualitas program diklat yang diberikan lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta, fasilitas penunjang yang dapat membantu dalam proses

---

<sup>62</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

pembelajaran diklat, sarana dan prasarana yang lengkap, widyaiswara yang ahli, dan output yang akan dihasilkan. Selain itu, balai diklat juga memiliki corak khas yakni bernuansa islami. Selain corak khas yang dimilikinya, balai juga memiliki keunggulan salah satunya ialah strategi unggulan dalam penyelenggaraan diklat. Hambatan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan diklat ialah saat pelaksanaan pelatihan jarak jauh(pjj), yang meliputi atas lambatnya akses internet atau sinyal yang lelet, dan ditemukan masih banyaknya peserta, dan panitia penyelenggara yang masih belum menguasai teknologi informasi. Namun, hal tersebut dapat diatasi balai dengan adanya penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelatihan jarak jauh(pjj).

### **C. Analisis Data**

Dalam analisis data ini akan diuraikan data mengenai Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Madrasah Di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

#### **1. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Julianty berpendapat bahwa perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah manajemen diklat yang didalamnya merupakan tahapan penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang

berubah dinamis. Dalam era globalisasi perencanaan haruslah lebih mengandakan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan firasat.<sup>63</sup> Sedangkan, Sarinah dan Mardalena mengemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan yang menyangkut dengan upaya yang dilakukan untuk melakukan antisipasi berbagai kecenderungan di masa mendatang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat guna mewujudkan target dan tujuan dalam berorganisasi.<sup>64</sup>

Perencanaan program diklat berperan sebagai titik tolak keberhasilan diklat dari rujukan pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan sebagai keberhasilan program diklat ditentukan oleh perencanaan program diklat ini. Pada dasarnya perencanaan merupakan upaya yang bertujuan mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya tercakup dalam suatu program diklat. Tujuan perancangan diklat adalah mencapai keberhasilan penyelenggaraan diklat. Perencanaan program diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini dilakukan dengan adanya analisis kebutuhan diklat.

Umumnya analisis kebutuhan diklat merupakan sebuah proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja dan produktivitas pegawai menjadi meningkat yang memiliki tujuan untuk memperoleh data akurat tentang diklat apa yang dibutuhkan untuk diselenggarakan kedepannya. Selain itu, *stakeholder* yang terlibat dalam proses penyelenggaraan diklat juga dapat

---

<sup>63</sup> Julianty Kasihan Hasibuan, Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Keagamaan Medan, "*Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*", Volume 9, No.2,2012, h.5.

<sup>64</sup> Sarinah, Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2012), h.7.

mengusulkan pelaksanaan diklat di tempat kerja (DDTK) dan dalam pelaksanaannya pun dapat disesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan anggaran diklat.<sup>65</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 menyatakan: “Pembiayaan diklat dibebankan pada anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>66</sup>

Anggaran biaya penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Setiap anggaran ini dibeda-beakan alokasinya sesuai kebutuhan. Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan tergantung dari standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dilihat juga dari jumlah pelaksanaan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, dan besaran honor bagi narasumber dan panitia pelaksanaan. Bahkan, di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin juga terdapat dana simpanan yang berguna untuk kegiatan diklat yang sifatnya mendadak. Besarnya dana simpanan tergantung dari

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama, *Pedoman Penyelenggaraan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), h.10.

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

pengelolaan keuangan. Hal yang menjadi masalah berkaitan dengan dana diklat ialah adanya regulasi yang menyebabkan tidak dibayarkannya honortarium narasumber dari dalam instansi. Salah satu solusi yang di dilakukan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ialah dengan menjadikan narasumber dari dalam instansi bukan sebagai tugas pokok dan fungsinya, tetapi sebagai tenaga ahli keprofesian lain”.<sup>67</sup> Sedangkan, pembiayaan diklat di tempat kerja yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin berasal dari anggaran DIPA, dalam proses penganggarannya pun dilakukan setiap 1 tahun sekali sebelum diklat diselenggarakan.<sup>68</sup>

Salah satu bentuk proses perencanaan diklat tenaga administrasi yang dibuat di balai ini dilakukan berdasarkan kerangka acuan yang sering disebut dengan istilah TOR, yang di dalamnya terdapat pembagian peserta, pembuatan jadwal, permohonan pengajaran, serta proses persiapan diklat lainnya. Salah satu bentuk kerangka acuan yang ada di balai ialah kurikulum diklat, rekap kegiatan diklat, dan lain sebagainya.<sup>69</sup> Selain itu, strategi pembelajaran diklat yang dilakukan haruslah

---

<sup>67</sup> Ratu Kamaliah, S.Pd.I, Administrasi Keuangan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

<sup>68</sup> Samadi, S.Pd.I, Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, Wawancara pribadi, 01 Februari 2021, Pukul.13:57.

<sup>69</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

dijalankan oleh seorang widyaiswara yang profesional.<sup>70</sup> Selanjutnya, metode diklat yang digunakan dalam kegiatan diklat ini biasanya menerapkan cara pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) dengan menggunakan metode yang lebih bervariasi. Disini widyaiswara berperan bukan sebagai pengajar atau guru di sekolahan, tetapi selayaknya widyaiswara berperan sebagai fasilitator yakni orang yang memfasilitasi peserta selama diklat berlangsung. Mengingat peserta diklat merupakan orang dewasa yang telah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya yang perlu dikembangkan. Sehingga, mereka tidak perlu diperlakukan seperti siswa.<sup>71</sup>

Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan penyelenggaraan diklat, widyaiswara, peserta, dan alumni diklat, tenaga ahli, dan unsur lain yang terkait. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan oleh Kurikulum Diklat Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

Hasil analisis penulis berdasarkan teori dan temuan di atas, perencanaan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin telah terlaksana dengan sangat baik, karena perencanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang lengkap dan sistematis serta mengedepankan skala prioritas. Selanjutnya melihat dari bentuk kerangka acuan

---

<sup>70</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

<sup>71</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

atau TOR (*Term of Reference*) atau kursil yang didalamnya berisikan gambaran umum dan penjelasan mengenai sebuah kegiatan diklat yang akan dilaksanakan kedepannya sesuai tujuan program diklat yang dibutuhkan peserta. Selanjutnya, salah satu bentuk persiapan yang dilakukan balai ialah dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat Kerangka ajuan untuk kegiatan diklat,
- 2) Melakukan rapat persiapan,
- 3) Pemanggilan peserta,
- 4) Membuat jadwal,
- 5) Membuat permohonan pengajar,
- 6) Menyiapkan diklat, diklat terbagi atas dua jenis yakni diklat yang dilakukan di dalam dan di luar kampus. Jika di dalam kampus, maka balai akan menyiapkan tempat untuk diselenggarakannya diklat. Selanjutnya, diklat yang dilakukan di luar kampus ini sering disebut dengan istilah Pelatihan jarak jauh (pjj), dalam penyelenggaraannya balai akan menyiapkan panitia khusus dalam penyelenggaraannya. Kemudian, dalam prosesnya akan dibicarakan semua hal yang berkaitan dengan diklat mulai dari nama widyaiswara, materi atau silabus, jenis program diklat, dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

Dalam proses persiapannya balai diklat biasanya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan berbagai pihak didalamnya yakni diantaranya Kepala Balai sebagai penanggung jawab, pimpinan seksi diklat teknis dan diklat administrasi, widyaiswara sebagai instruktur, dan panitia pelaksana sebagai penanggung jawab suksesnya kegiatan diklat berlangsung. Dilihat dari koordinasi dan pembagian kerja yang ada di balai, terlihat jelas bahwasanya pengelolaan diklat di balai telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan mempertimbangkan skala prioritas program diklat dan ketersediaannya anggaran diklat. Anggaran penyelenggaraan diklat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), yakni anggaran DIPA, yang dilakukan setiap 1 tahun sekali sebelum diklat diselenggarakan.<sup>73</sup>

## **2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, Pasal 16 Lampiran I Bab IV sebagai berikut yang menyatakan:

- 1) Penyelenggaraan diklat pada Kementerian Agama mengikuti pedoman penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang diklat yang ditetapkan,
- 2) Penyelenggaraan diklat dapat diselenggarakan di pusdiklat, balai diklat, jarak jauh, atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat diklat,

---

<sup>73</sup> Samadi, S.Pd.I, Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, Wawancara pribadi, 01 Februari 2021, Pukul.13:57

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan diklat yang ditetapkan oleh kepala badan.<sup>74</sup>

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan balai diklat ini dilaksanakan berpedoman pada Kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) dan Balai Diklat Keagamaan. Selain itu juga, terdapat beragam program diklat yang ada diselenggarakan balai yaitu ialah Diklat Administrasi, Diklat Teknis Pendidikan dan Diklat Teknis Keagamaan.<sup>75</sup> Selanjutnya, terdapat beberapa jenis program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan balai khusus bagi tenaga kependidikan madrasah ialah diklat tata naskah dinas, etos kerja, pengelolaan keuangan, barang dan jasa, manajemen madrasah, dan lain sebagainya. Pendidikan dan Pelatihan di balai ini diselenggarakan secara klasikal dan non klasikal.<sup>76</sup> Diklat yang dilaksanakan secara klasikal ini, dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi diklat. Sedangkan, diklat yang dilaksanakan secara non klasikal ini dalam prosesnya dilaksanakan secara tidak langsung (online), hal ini merupakan salah satu upaya antisipasi yang

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, h. 15-16.

<sup>75</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, Pasal 1, Nomor 28, Nomor h.8.

<sup>76</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

dilakukan balai dalam mencegah dan mengatasi penyebaran virus corona (*covid-19*).

Dalam pelaksanaannya, non klasikal dengan memanfaatkan media Informasi Teknologi yakni berupa pelatihan jarak jauh (pjj). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan peserta dalam melaksanakan pelatihan jarak jauh (pjj), yakni banyaknya *stage holder* yang masih belum mengenal dan mahir dalam mengoperasikan Teknologi Informasi dan penggunaan sistem pelatihan jarak jauh (pjj). Untuk itu, salah satu cara yang dilakukan balai dalam mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan diklat, maka balai diklat menyelenggarakan bimbingan teknis pelatihan pelatihan jarak jauh (bimtek pjj).<sup>77</sup> Melalui bimtek peserta akan dibimbing menggunakan aplikasi pembelajaran, pelaksanaan diskusi interaktif, dan cara mengisi materi pembelajaran, membuat kuis ujian, membuat penilaian, dan penetapan pembelajaran lainnya yang dilakukan secara jarak jauh. Peserta yang mengikuti bimtek pjj ini terdiri atas widyaiswara, dan JFU atau staf.<sup>78</sup> Selanjutnya, salah satu bentuk tantangan dalam proses pelaksanaan pelatihan jarak jauh (pjj), disini setiap peserta dituntut untuk menguasai teknologi memudahkan dalam proses

---

<sup>77</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

<sup>78</sup> Dikutip pada <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/bimtek-pelatihan-jarak-jauh-pjj-pada-bdk-banjarmasin>, "BIMTEK Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) pada BDK Banjarmasin, 31/01/2021 Pukul 11.59 WIT.

pembelajaran diklat yang dapat menjadi penghambat keberhasilan dalam proses pelaksanaan diklat.<sup>79</sup>

Hasil analisis penulis berdasarkan teori dan temuan di atas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini telah berjalan dengan efektif dan efisien. Balai telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai. Prosedur pelaksanaan diklat ini dilakukan dengan sistematis. Kelebihan yang ditawarkan balai diklat salah satu diantaranya ialah balai diklat merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan yang selalu siap siaga dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lapangan, yang dibuktikan dengan adanya wabah corona virus yang melanda tiap daerah, balai diklat pun telah membuktikan ke siap siagapannya dengan melakukan antisipasi penyebaran virus tersebut dengan tetap menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu melalui pelatihan jarak jauh (pjj). Meskipun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya ialah ditemukan masih banyak nya *stakeholder* yang belum mahir dalam mengoperasikan teknologi informasi komputer. Namun, hal tersebut dapat diatasi balai diklat dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pelatihan jarak jauh (bimtek pjj). Selain itu, kelebihan balai diklat dengan lembaga penyelenggara diklat lainnya dibuktikan dengan program diklat

---

<sup>79</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

yang ditawarkan lebih bervariasi, sarana dan prasarana diklat yang lengkap, instruktur yang ahli dalam bidangnya, dan berbagai keunggulan lainnya.

### **3. Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Hardjana, mengemukakan bahwa evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian. Evaluasi diklat berarti penilaian terhadap diklat yang telah dilaksanakan.<sup>80</sup> Selanjutnya, menurut Hasan Basri dan Rusdiana mengemukakan bahwa evaluasi diklat merupakan komponen penting dalam sistem diklat. Tanpa evaluasi, tidak dapat diketahui program diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat berhasil atau tidak.<sup>81</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Nomor (3), menyatakan bahwa:

“Evaluasi pelaksanaan diklat meliputi ketercapaian tujuan dan sasaran diklat, ketepatan agenda pembelajaran, kesesuaian widyaiswara dan peserta, ketersediaan sarana dan prasarana diklat, serta kesesuaian pembiayaan, bahan pelatihan, dan metode pembelajaran”.<sup>82</sup>

Selanjutnya, Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi mengemukakan bahwa evaluasi diklat merupakan suatu alat yang dapat mengukur

---

<sup>80</sup> Hardjana, *Training Sumber Daya Manusia yang Efektif*, (Yogyakarta: Kanisus, 2001), h.17.

<sup>81</sup> Hasan Basri, Rusdiana, *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h.100.

<sup>82</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Keputusan Kepala Administrasi Negara Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001), h.7.

dan mengetahui apakah suatu program diklat mencapai sasaran yang dihadapkan dengan penekanan pada aspek hasil (*output*), serta mengukur apakah program diklat dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>83</sup>

Pelaksanaan evaluasi diklat tenaga administrasi di balai ini berpedoman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan diklat di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini serupa dengan Bab XIV tentang evaluasi, monitoring, dan pelaporan pasal 32, yang menyatakan bahwa: “(1) Evaluasi dilakukan terhadap proses penyelenggaraan diklat; (2) Monitoring dilakukan terhadap hasil penyelenggaraan diklat; (3) Instrumen evaluasi dan monitoring ditetapkan oleh Kepala Badan.<sup>84</sup>”

Salah satu bentuk tolak ukur keberhasilan pelaksanaan evaluasi diklat di balai ialah perkembangan pengetahuan, keterampilan peserta diklat yang dapat dilihat dari keberhasilannya dalam menerapkan ilmunya saat bekerja, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Evaluasi diklat ini dilakukan secara terkoordinasi, dan dilakukan langsung oleh panitia khusus yang bertugas melalui wilayah kerja Kementerian Agama atau tempat peserta yang akan di diklat. Salah satu panitia khusus yang terlibat dalam proses evaluasi diklat ialah diantaranya panitia, pejabat,

---

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Diklat*, (Jakarta: Kementerian RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2018), h.2.

<sup>84</sup> Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, h.23.

dan widyaiswara. Sedangkan yang bertugas sebagai pengontrol dan pemantau kegiatan diklat di balai ini dilakukan oleh seluruh manajemen struktural di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Salah satu cara yang dilakukan balai ialah dengan turung langsung ke daerah atau wilayah kerja diselenggarakannya diklat, yang kemudian setelahnya balai diklat menggali kembali informasi dengan panitia yang ada di masing-masing daerah tentang bagaimana proses pelaksanaan kegiatan diklat berlangsung.

Hasil analisis penulis berdasarkan teori dan temuan di atas, evaluasi pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini telah berjalan dengan efektif dan efisien. Balai telah melaksanakannya dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Selain itu, evaluasi diklat di balai juga dapat dilakukan secara online melalui pelatihan jarak jauh (pjj) yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yakni aplikasi pembelajaran diklat jarak jauh yang bernama aplikasi SIMDIKLAT (Sistem Informasi Manajemen Kediklatan). SIMDIKLAT merupakan aplikasi yang dibangun oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu aplikasi yang sangat membantu panitia pelaksana diklat, terdapat beberapa kemudahan dari aplikasi ini ialah salah satu diantaranya yaitu mempermudah panitia pada saat proses pendataan peserta diklat khususnya saat proses registrasi peserta, memudahkan panitia dalam mencetak sertifikat saat penutupan diklat, memudahkan proses pelaporan diklat yang biasanya sering mengalami keterlambatan. Dari

berbagai kemudahan dan manfaat yang dirasa panitia dan peserta saat menggunakan aplikasi SIMDIKLAT. Tentu dalam pelaksanaan tidaklah mudah, salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengoperasian aplikasi ini ialah setiap peserta, panitia dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses diklat ini dituntut untuk lebih menguasai dalam hal pengoperasian teknologi informasi. Salah satu antisipasi yang dilakukan balai untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta atau panitia yang belum menguasai teknologi informasi ini ialah dengan mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan untuk membantu peserta panitia, dan pihak lain yang belum menguasai teknologi informasi.

#### **4. Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Pelaporan merupakan salah satu dari jenis naskah dinas. Hal ini seiring dengan Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, menyatakan bahwa: “Laporan merupakan salah satu dari jenis naskah dinas. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian”.<sup>85</sup> Sedangkan, menurut Paramita Atuningtyas, pelaporan diklat merupakan media pertanggung jawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan, pencapaian, dan

---

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, *Pedoman Penyusunan Laporan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h.1.

analisis keberhasilan atau kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat.<sup>86</sup>

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian penyelenggaraan diklat. Sejatinya pelaporan merupakan pertanggung jawaban formal yang harus dilakukan oleh pengelola atas berbagai sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat. Dokumen laporan diklat sendiri merupakan bukti tertulis atau portofolio yang menegaskan bahwa diklat telah selesai diselenggarakan sesuai dengan rancangan.<sup>87</sup>

Dalam pelaksanaannya proses pelaporan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, mengacu pada pedoman khusus yang telah ditetapkan khusus oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah Dinas Kementerian Agama, hal ini dilakukan bertujuan guna menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan penyelenggaraan diklat.<sup>88</sup> Proses pelaporan berdasarkan sistemnya meliputi beberapa tahapan yaitu laporan persiapan, laporan pada atasan di badan diklat dan pus diklat, dan laporan sesudah pelaksanaan diklat yang dapat

---

<sup>86</sup> Paramita Ayuningtyas, *Skripsi Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2009), h.39.

<sup>87</sup> Abdorrahman Gintings, *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan: Esensi Praktis*, (Bandung: Humaniora Utama Press), h.61.

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, *Pedoman Penyusunan Laporan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h.1.

dilakukan secara offline maupun online. secara offline, laporan berupa hard copy, sedangkan online berupa soft file yang laporannya kemudian akan dikirimkan secara online. Dilihat dari tingkat efesiansinya, pelaporan dapat dilakukan secara online.<sup>89</sup> Selanjutnya, pelaporan diklat tersebut akan disampaikan ke pusat Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) dan Diklat Kementerian Agama Jakarta. Kemudian, peserta juga akan mendapatkan sertifikat, bahan untuk belajar.<sup>90</sup> Dalam hal ini widyaiswara juga ikut bertugas memberikan pelaporan, salah satu bentuk pelaporan yang dilakukan widyaiswara ialah dengan membuat surat tugas, surat telah melaksanakan kegiatan, bahan tayang, dan bahan ajar.<sup>91</sup>

Hasil analisis penulis berdasarkan teori dan temuan di atas, pelaporan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, sudah terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi antara pihak satu dengan pihak lain, yaitu koordinasi antara peserta dengan Widyaiswara, Kepala Balai dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Selain itu, pelaporan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin memiliki acuan dalam penyusunan laporannya, yaitu mengacu pada pedoman khusus yang telah ditetapkan khusus oleh Badan Litbang

---

<sup>89</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

<sup>90</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

<sup>91</sup> Abdul Hamid, Bapak Koordinator Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 12.25 WITA.

dan Diklat Kementerian Agama, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah Dinas Kementerian Agama, hal ini dilakukan bertujuan guna menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan penyelenggaraan diklat. selain itu, pedoman ini bertujuan sebagai standar penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan.

#### **5. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin**

Manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan gabungan dua kata, yaitu manajemen yang berarti pengelolaan dan pendidikan dan pelatihan yang juga diartikan sebagai lembaga pendidikan islam dan kepelatihan. Manajemen pendidikan dan pelatihan sering disebut juga *institusi training*, yang memiliki fungsi sebagai tempat meningkatkan membina kompetensi .<sup>92</sup>

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna yaitu suatu keadaan atau penyebab lain yang menghambat atau menghalangi. Sedangkan hambatan merupakan sesuatu yang menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.<sup>93</sup> Sedangkan, kata pendukung memiliki makna mendorong.

---

<sup>92</sup> Sukardi, Siti Nurjanah, *Manajemen Diklat dan Kepelatihan (Diklat) Vokasi dan Kejuruan*, (Yogyakarta: UNY Press. 2016). h.20.

<sup>93</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.505.

Berdasarkan teori dan temuan di lapangan, hasil analisis penulis menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam proses penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yaitu sebagai berikut.

1) Faktor Penghambat Keberhasilan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

Berikut ini beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yaitu:

a. Akses internet atau sinyal yang lelet

Hambatan yang sering terjadi di balai diklat ialah pada saat pelaksanaan diklat, yang sering dialami peserta yakni lambatnya akses internet atau sinyal yang lelet pada saat berlangsungnya pelatihan jarak jauh (pjj).<sup>94</sup>

b. Kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi komputer

Hambatan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan diklat ialah berkaitan dengan kurangnya keterampilan sumber daya manusia di balai, masih banyak yang belum menguasai teknologi informasi, yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki *stage holder* saat mengikuti diklat secara online yaitu pelatihan jarak jauh(pjj). Untuk melaksanakan pelatihan jarak jauh(pjj)

---

<sup>94</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.

inilah, *stage holder* dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Maka, salah satu solusi yang dilakukan balai dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan mengadakan bimbingan teknis pelatihan jarak jauh atau sering disebut dengan istilah bimtek pjj.<sup>95</sup>

c. Keterlambatan atau kurangnya peserta diklat yang dikirimkan tiap daerah

Dalam penyelenggaraannya juga terdapat faktor lain yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan diklat, yakni diantaranya ialah kurangnya peserta yang dikirimkan tiap daerah yang mengikuti diklat. Untuk itu salah satu antisipasi yang dilakukan balai diklat ialah dengan memberikan informasi tenggang batas waktu pengiriman data peserta yang akan mengikuti diklat untuk menghindari kurangnya data peserta yang mengikuti diklat.<sup>96</sup>

d. Kesulitan widyaiswara dalam menyesuaikan penyampaian materi diklat secara online

Hambatan yang sering dirasakan widyaiswara dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh (pjj) ini berasal dari penyampaian yang dilakukan widyaiswara secara online yang harus disesuaikan dengan virtual meeting dan bahan ajar diklat. Serta, belum adanya modul secara virtual, sinyal yang lelet, dan latar

---

<sup>95</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

<sup>96</sup> Bapak Zarkani, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 09.15 WITA.

belakang tiap peserta yang berbeda-beda, yang dilihat dari budaya, usia, gaya belajar, dan lain sebagainya.

## 2) Faktor Penunjang Keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

Untuk menghasilkan lulusan diklat yang sesuai dengan target, tujuan program diklat, tentulah penyelenggaraannya harus direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dengan baik. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin memiliki standar diklat tersendiri yang berguna sebagai acuan minimal kesesuaian pelaksanaan program diklat. Standar diklat ini merupakan sebuah kriteria minimal dalam penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan.<sup>97</sup> Berikut ini beberapa keunggulan yang menjadi faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yakni diantaranya sarana dan prasarana yang lengkap, instruktur atau widyaiswara yang ahli, serta terdapatnya banyaknya program diklat yang sesuai dengan kebutuhan peserta diklat. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

---

<sup>97</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Standar Program Pelatihan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Kementerian Agama RI, 2018), h.2.

a. Sarana dan Prasarana yang lengkap

Dalam penyelenggaraannya di balai diklat terdapat berbagai sarana dan prasarana yang lengkap yang berguna sebagai penunjang keberhasilan balai dalam menyelenggarakan diklat. Tentulah, balai diklat telah mempunyai standar mutu sarana prasarana yang lengkap. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan diklat selama proses diklat berlangsung. Sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya ialah ruang belajar yang dilengkapi meja, kursi, sound system, LCD, dan dengan adanya pelatihan jarak jauh(pjj) sarana yang diperlukan LMS (*Learning Management System*).<sup>98</sup>

b. Peserta mendapatkan fasilitas selama proses diklat berlangsung

Dalam penyelenggaraannya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin memberikan fasilitas kepada tiap peserta yang mengikuti diklat. Fasilitas ini dapat berupa bahan ajar, bahan tayang, makalah, dan bahan lainnya yang dibutuhkan peserta saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Berkas dan Arsip tersimpan dengan baik

Penyimpanan berkas yang ada di seksi diklat tenaga administrasi ini disimpan di ruangan khusus yakni ruang seksi diklat tenaga administrasi, ketika sudah

---

<sup>98</sup> Muhammad Yudil Khairi, Widyaiswara Ahli Muda Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 26 Januari 2021, Pukul 12.20 WITA.

sampai waktu retensi arsipnya, maka berkas atau arsip yang tersedia ini di serahkan kepada unit arsip (*arsiparis*).<sup>99</sup>

d. Program diklat yang lengkap

Program diklat yang tersedia di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin sangatlah lengkap. Umumnya dalam pelaksanaan diklat widyaiswara bertugas memberikan bimbingan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Misalnya saja analisis pendidikan, administrasi sekolah, keadministrasian yang di tangani oleh widyaiswara yang ahli dalam bidang pengadministrasian. Program diklat penyuluhan islam yang ditangani oleh widyaiswara yang ahli dalam bidang keagamaan, dan sebagainya.<sup>100</sup>

e. Bercorak islami

Salah satu yang menjadi corak khas yang dimiliki Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ialah salah satu lembaga penyelenggara diklat yang bernuansa keislaman, yang memiliki tugas guna menghasilkan seorang Aparatur Sipil Negara yang professional yang berlandaskan nilai keislaman.

---

<sup>99</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

<sup>100</sup> Ibu Niken, Seksi Diklat Tenaga Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 28 Desember 2020, Pukul 11.15 WITA.

f. Strategi unggulan dalam penyelenggaraan diklat

Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin juga memiliki keunggulan dan kelebihan salah satu ialah strategi unggulan dalam kegiatan diklat, terlihat jelas dari strategi kegiatan diklat yang ada lebih bervariasi. Pertama, secara regular atau konvensional, strateginya seluruh peserta dipanggil balai diklat. Kedua, WDWK (pelatihan di wilayah tempat kerja) yang dilakukan diberbagai wilayah kerja balai diklat yang meliputi kalimantan selatan, kalimantan timur, kalimantan utara, kalimantan tengah. Serta strategi unggulan yang dimiliki balai diklat ialah diklat kerjasama (DKS).<sup>101</sup>

g. Penyelenggaraan dapat dilakukan secara E-Learning

Penyelenggaraan diklat secara E-learning ini dibangun sebagai sarana terwujudnya proses diklat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga sebagai wujud antisipasi balai dalam penyebaran virus corona sesuai dengan kebijakan kepala balai yang mengacu pada kebijakan *Work From Home* (WFH) dengan dibuktikan adanya laporan harian WFH perminggu. Kebijakan lainnya adalah dengan melaksanakan rapat, koordinasi seluruh ASN melalui aplikasi zoom. Selain itu juga berbagai kegiatan diklat dialihkan secara E-

---

<sup>101</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WIT

Learning. Untuk mempermudah peserta dan panitia, penulis akan melampirkan prosedur pelaksanaan diklat secara E-Learning.

**Gambar I. Halaman Awal E-Learning**



**Gambar II. Login E-Learning.**



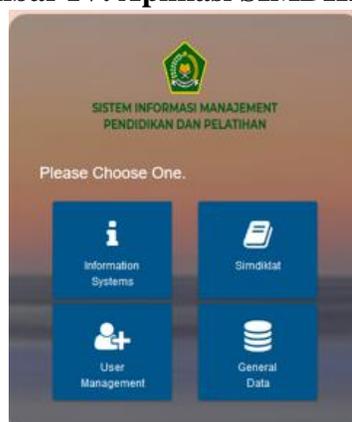
Sumber. <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id>.

**Gambar III. Rapat Koordinasi via zoom**



Selain itu Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin juga memiliki beberapa aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat, yaitu sebagai berikut ini.

**Gambar IV. Aplikasi SIMDIKLAT**



Sumber <https://simdiklat-kemenag.id/sso/>

SIMDIKLAT berfungsi sebagai alat bantu untuk mempersiapkan peserta diklat dan data alumni.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> <https://simdiklat-kemenag.id/sso/>, diakses pada 13 Maret 2021, Pukul 16.00 WITA.

### Gambar V Aplikasi SIMLITBANG



Sumber. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

Aplikasi SIMLITBANG merupakan aplikasi yang berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Kementerian Agama.<sup>103</sup>



Sumber. <https://tashih.kemenag.go.id/>

Aplikasi yang memberikan layanan tashih Online Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>103</sup> <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>, diakses pada 13 Maret 2021, Pukul 16.25 WITA.

Dengan aplikasi ini, perusahaan penerbit, lembaga pemerintah, dan yayasan dapat mengajukan permohonan surat tanda tashih dan surat izin edar untuk Al-Qur'an yang edarkan di Indonesia, dan masyarakat dapat melaporkan aduan seputar mushaf Al-Qur'an dan mengecek Surat Tanda Tashih mushaf Al-Qur'an.<sup>104</sup>

**Gambar VII. Aplikasi SIPPA**



Sumber. <https://tashih.kemenag.go.id/>

SIPPA merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan kepada kebutuhan eksternal Badan Litbang dan Diklat, serta unit kerja Pembina terkait. Seluruh Kepala Balai Litbang, Kepala Balai Diklat, Kepala Lajnah, dan Seluruh Kepala Unit Eselon II di Pusat (Sekretaris, Kepala Puslitbang, dan Kepala Pusdiklat) berkewajiban menyampaikan laporan tersebut maksimal tanggal 9 pada bulan berikutnya.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini telah berjalan efektif dan efisien. Meskipun, dalam

<sup>104</sup> <https://tashih.kemenag.go.id/> diakses pada 13 Maret 2021, Pukul 16.30 WITA.

<sup>105</sup> <https://tashih.kemenag.go.id/> diakses pada 13 Maret 2021, Pukul. 17.00 WITA.

pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat keberhasilannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di balai. Namun, hal tersebut mampu di atasi balai diklat. Salah satu hambatan terbesar yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini ialah saat berlangsungnya pelatihan jarak jauh(pjj), yakni pada saat pelaksanaannya masih ditemukannya peserta yang masih belum bisa mengoperasikan teknologi informasi komputer. Namun, salah satu antisipasi yang dilakukan balai ialah dengan adanya bimbingan teknis pelatihan jarak jauhatau yang sering disebut dengan istilah bimtek pjj. Selain itu, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin juga memiliki banyak kualitas unggul yang dapat menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan balai dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Salah satunya ialah corak keislaman yang dimiliki balai, yang menjadi nilai khas pembeda balai diklat dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Serta, strategi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di balai ialah strategi diklat kerjasama (dks).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Risdiyati, Widyaiswara Bagian Umum Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Wawancara pribadi, Landasan Ulin, 01 Februari 2021, Pukul 02.00 WITA.